JURNAL PELAYANAN PUBLIK
ISSN : 3063- 3281
Vol. 2, No. 2, 2025

KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

Wartini [1], Djayeng Turano Gunade [2], Agus Sya'bani Arlan[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email: wartinibalangan@gmail.com

ABSTRAK

KB didefinisikan sebagai peningkatan standar masyarakat terkait usia perkawinan, peraturan melahirkan, dan pembinaan keluarga harmonis untuk mencapai keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. unit keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keampuhan penyuluhan KB di Kecamatan Parenting Kabupaten Balangan beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang bercirikan deskriptif. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan pendokumentasian. Sumber data untuk identifikasi informan dengan seleksi selektif terhadap 15 informan dievaluasi dengan menggunakan teknik reduksi data, metode penyajian, dan proses verifikasi atau kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penyuluh keluarga berencana di kecamatan paringin kabupaten balangan sudah cukup baik, seperti yang ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut: Pertama, Kualitas Kerja, Penyuluh KB memiliki kemampuan yang cukup baik dalam edukasi (IUD & Implan). Kedua, Kuantitas Kerja, Pelayanan sudah berjalan cukup baik, namun keterbatasan jumlah penyuluh. Partisipasi masyarakat dalam konservasi jangka panjang masih rendah. Ketiga, Pelaksanaan Tugas, Program KB menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih ada kendala kurang kader dan tenaga penyuluh. Keempat, Tanggung Jawab, Penyuluh KB memahami dalam menjalankan tanggung jawab sudah cukup baik, namun masih ada kesenjangan antara informasi kepada masyarakat. Faktor pendukung Penyuluh KB sesuai prosedur, bekerja sama dengan kader desa dan tokoh masyarakat dalam program KB. Faktor penghambat meliputi kurangnya fasilitas minimnya penyuluh, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, Penyuluh Keluarga Berencana

ABSTRACT

Family planning is defined as an increase in community standards related to the age of marriage, childbirth regulations, and harmonious family development to achieve small, happy, and prosperous families. family units. This study aims to evaluate the efficacy of family planning counseling in Parenting District, Balangan Regency along with the variables that influence it. This study uses a qualitative methodology characterized by descriptive. The data collection approach used includes interviews, observations, and documentation. Data sources for identifying informants with selective selection of 15 informants were evaluated using data reduction techniques, presentation methods, and verification or conclusion processes. The results of this study indicate that the performance of family planning counselors in Paringin District, Balangan Regency is quite good, as indicated by the following indicators: First, Work Quality, Family Planning Counselors have quite good abilities in education (IUD & Implants). Second, Work Quantity, Services have been running quite well, but the number of counselors is limited. Community participation in long-term conservation is still low. Third, Implementation of Tasks, the Family Planning Program shows quite good results, but there are still obstacles in the form of a lack of cadres and counselors. Fourth, Responsibility, KB Extension Workers understand in carrying out responsibilities is quite good, but there is still a gap between information to the community. Supporting factors KB Extension Workers according to procedures, working together with village cadres and community leaders in the KB program. Inhibiting factors include lack of facilities, minimal extension workers, and low public awareness..

Keywords: *Performance, Family Planning Instructor*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan dan pengelolaan keluarga berencana merupakan isu kemanusiaan yang memerlukan regulasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Perkembangan yang efektif mengharuskan prokreasi manusia diatur dengan cara yang sama, memastikan bahwa peningkatan reproduksi dan kelahiran anak dikelola secara sistematis.

Kebingungan saat ini muncul dari kenyataan bahwa kelahiran anak telah melampaui prioritas produksi pangan daripada pertumbuhan reproduksi. Selain itu, perluasan populasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan output nasional yang cukup dapat menyebabkan masalah lain, termasuk fasilitas pendidikan yang tidak memadai, konsumsi makanan dan nutrisi yang tidak mencukupi, kurangnya layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang terbatas.Pelaksanaan kegiatan perencanaan untuk individu atau keluarga harus dilakukan secara optimal, sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di negara dan pemerintahan kita, sekaligus menghormati adat istiadat dan doktrin agama yang mapan yang menopang moralitas dan kemanusiaan.

Ini membutuhkan peraturan pemerintah dan dukungan publik yang luas.Tujuan mendasar dari program KB adalah untuk mengurangi tingkat kesuburan, sehingga meringankan beban pembangunan dan menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia, sejalan dengan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pengungkapan UU No. 52 tahun 2009 berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan pembentukan keluarga sejahtera. Ini mendefinisikan keluarga berencana sebagai pengembangan atau peningkatan standar masyarakat mengenai usia pernikahan, peraturan persalinan, dan pembentukan keluarga yang harmonis, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Paradigma baru Program Keluarga Berencana (KB), menurut Nasional, telah menggantikan tujuan semula yaitu tercapainya norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (KKBS) dengan tujuan berkembang menjadi keluarga yang berkualitas pada tahun 2015. Sebuah keluarga dapat diklasifikasikan sebagai keluarga yang berkualitas jika memiliki jumlah anak yang optimal, menunjukkan penilaian yang baik, mempertahankan pandangan yang positif, dan menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Program KB yang ada menekankan perlunya penegakan hak reproduksi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Program Keluarga Berencana Nasional meningkatkan kesejahteraan individu dan mendorong pembentukan keluarga yang harmonis, sejalan dengan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas populasi sekaligus mengurangi angka kematian yang diamati saat ini, dan mengadvokasi peningkatan pengawasan kelahiran dan kehamilan. Pemerintah keluarga Berecana memegang peranan penting dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan di bidang peningkatan taraf hidup masyarakat, yang bertujuan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga berencana atau keluarga berencana Mengatur latar belakang untuk memfasilitasi pertumbuhan penduduk dan ekonomi dalam masyarakat, karena mereka adalah agen kontrol utama. Sumber daya manusia sulit untuk dioptimalkan jika jumlah penduduk tidak dikelola secara memadai atau melebihi kapasitas masyarakat. Saat ini, populasi Indonesia mencapai sekitar 220 juta, dengan tingkat pertumbuhan 1,49 persen, menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3 hingga 3,5 juta individu, hampir setara dengan populasi Singapura.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memproyeksikan pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia saat ini akan mencapai 273 juta jiwa. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat, karena kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat mengakibatkan populasi yang lebih besar di masa mendatang. Pemerintah federal, provinsi, dan kabupaten / kota akan memiliki

beban yang cukup besar dalam memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan lainnya.

Laju pertumbuhan di Kabupaten Balangan tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, yang mendefinisikan KB sebagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan mengedepankan usia pernikahan yang sesuai, menerapkan KB, memperkuat ketahanan keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mencapai keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Kabupaten Balangan Keampuhan penyuluh masih belum cukup untuk membujuk masyarakat memanfaatkan alat kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, warga Balangan menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang berbagai metode kontrasepsi sehingga penggunaan alat kontrasepsi menjadi rendah. Di antara 2.590 pasangan usia subur, hanya 430 yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, sedangkan 1.351 menggunakan metode non-jangka panjang.

Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. di temukan beberapa fenomena permasalahan, diantaranya: Kurangnya sosialisasi tentang program Keluarga Berencana MKJP, minimnya sosialisasi mengenai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat dan keamanannya. Akibatnya, masih terdapat keraguan serta kesalahpahaman mengenai metode ini, yang diperparah oleh beredarnya informasi yang tidak akurat atau mitos yang keliru, Sedikitnya pengguna KB MKJP, Karena kurangnya edukasi dan pemahaman yang benar, jumlah pengguna KB MKJP masih tergolong rendah. Banyak pasangan lebih memilih metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil atau suntik karena dianggap lebih mudah digunakan atau lebih sesuai dengan kebiasaan mereka. Selain itu, kekhawatiran terhadap efek samping serta prosedur pemasangan dan pencabutan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan MKJP. Sedikitnya jumlah penyuluh KB, Terbatasnya jumlah penyuluh KB berdampak pada kurangnya edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai program KB, khususnya MKJP. Penyuluh KB di kecamatan paringin hanya berjumlah 4 orang sedangkan di kecamatan paringin ada 2 keluranan dan 14 desa, untuk idealnya 1 Penyuluh KB maksimalnya 3 desa. Jika jumlah penyuluh tidak mencukupi, maka cakupan edukasi menjadi terbatas, sehingga masyarakat kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai MKJP, serta kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan KB MKJP, khususnya IUD dan Implant, Selain keterbatasan informasi, rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan MKJP juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Dalam beberapa komunitas, keputusan terkait penggunaan kontrasepsi sering kali bergantung pada suami atau keluarga besar. Selain itu, kekhawatiran mengenai prosedur pemasangan serta potensi efek samping juga menjadi alasan mengapa banyak pasangan enggan memilih metode ini.

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Sutrisno, 2016) “kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.” Menurut (Mangkunegara 2017) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja *(job performance)* karyawan, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tampa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukumya. (Mahsun, 2019).

Menurut (Robbins, 2016) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut (Mueheriono, 2014) Kinerja atau *Perfomance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Dalam mengukur Kinerja ini di perlukan indikator atau alat ukur kinerja. Menurut (Mangkunegara, 2017) menguraikan alat ukur sebagai berikut:

1) Kualitas
   Kualitas pekerjaan mengacu pada efektivitas seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan.
2) Kuantitas
   Kuantitas pekerjaan mengacu pada durasi kerja harian seorang karyawan. Volume pekerjaan tercermin dalam produktivitas setiap karyawan.
3) Pelaksanaan tugas
   Pelaksanaan tugas melibatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan dengan tepat dan tanpa kesalahan.
4) Tanggung jawab
   Tanggung jawab mencakup kesadaran karyawan akan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka.

METODE

Menurut Sugiyono dalam (Pasalong, 2017) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik, teknik pengumpulan data bersama induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan merinci suatu variabel, gejala, skenario, atau fenomena sosial tertentu.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan untuk mengungkap semua atau banyak segi dari subjek penelitian (Anggara, 2015) . Dalam metodologi penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

1. Kualitas Kerja

Kualitas pekerjaan mengacu pada kemampuan atau kecakapan individu dalam melaksanakan kegiatan secara akurat dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Pekerjaan berkualitas tinggi dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan standar organisasi suatu program.

a. Kemampuan

Kemampuan mengacu pada kapasitas dan kecakapan individu untuk melakukan tugas dengan cepat dan akurat. Kemampuan dapat muncul dari faktor bawaan atau dari pelatihan dan latihan.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sudah cukup baik, dan penyuluh Keluarga Berencana (KB) sudah berjalan dengn baik. Bahkan mereka memiliki peran penting dalam memberikan informasi, edukasi, dan pelayanan yang tepat kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mereka menggunakan teknologi, seperti aplikasi pelaporan Siga, untuk mendokumentasikan dan mengelola data terkait program-program KB seperti BKB, BKR, dan BKL. Selain itu, Penyuluh KB memiliki kemampuan yang komprehensif, baik dalam komunikasi, strategi, pemanfaatan teknologi, maupun pendekan personal, yang semuanya bertujuan untuk mendukung keberhasilan program KB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

b. Kepuasan

Kepuasan adalah respons emosional dari kesenangan atau kekecewaan yang dialami oleh seseorang setelah mengevaluasi kinerja atau hasil yang mereka rasakan terhadap harapan mereka, standar keunggulan yang diantisipasi, dan kemampuan untuk mengatur standar tersebut untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sudah baik dapat di simpulkan mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terkait kepuasan masyarakat terhadap penyuluh KB di Kecamatan Paringin menunjukkan hasil yang baik. Agar pelayanan KB dapat lebih optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan program KB dapat berjalan lebih baik dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, penyuluh KB telah berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti program KB di kecamatan paringin tersebut.

2. Kuantitas Kerja

Kuantitas pekerjaan mengacu pada volume tugas yang dapat dilakukan oleh Penyuluh keluarga berencana dalam jangka waktu tertentu. Volume pekerjaan dilihat dari outcome kinerja penyuluh KB dalam memenuhi tugas dan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

a. Jumlah Kerja

Jumlah kerja penyuluh keluarga berencana (KB) adalah total aktivitas atau tugas yang dilaksanakan oleh seorang penyuluh KB dalam rangka memberikan pelayanan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terkait jumlah kerja sudah cukup baik, menurut masyarakat mengenai sosialisasi penyuluhan perbulan ke desa masih kurang, dapat disimpulkan bahwa jumlah kerja penyuluh KB sangatlah beragam. Tugas utama seorang penyuluh KB adalah memberikan pelayanan, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Jumlah kerja penyuluh KB sangatlah penting bagi keberhasilan program keluarga berencana. Tugas penyuluh KB tidak hanya sebatas memberikan pelayanan KB, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Jumlah Hasil Kerja

Jumlah hasil kerja ini menjadi indikator keberhasilan program keluarga berencana dalam mendukung pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga. Jumlah keluarga atau individu yang mendapatkan penyuluhan, pendampingan, atau informasi terkait KB.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terkait jumlah hasil kerja sudah cukup baik dengan adanya kegiatan penyuluhan KB yang dilakukan oleh penyuluh telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program KB. Dan berdasarkan hasil data di atas dapat kita lihat untuk penggunaan KB MKJP, khususnya IUD dan Implant masih kurang nya minat masyarakat tentang KB, bisa di lihat dari data tersebut untuk desa balang pengguna IUD setiap tahunnya 12 orang, pengguna Implant setiap tahunnya 56 orang, untuk desa babayau pengguna IUD setiap tahunnya 84 orang, pengguna Implant setiap tahunnya 96 orang, untuk desa lamida bawah pengguna IUD setiap tahunnya 24 orang, pengguna Implant setiap tahunnya 62 orang, untuk desa layap pengguna IUD setiap tahunnya 37 orang, pengguna Implant setiap tahunnya 70 orang. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terarah serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu penurunan angka kelahiran dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) melibatkan pelaksanaan tugas oleh tenaga ahli keluarga berencana untuk memberikan pendidikan, informasi, dan pelayanan kepada masyarakat tentang inisiatif keluarga berencana. Perluasan keluarga berencana berupaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam pengaturan kependudukan, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

a. Terlaksananya Tugas

Tugas penyuluh keluarga berencana (KB) terlaksana melalui berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. Penyuluh KB bertugas sebagai penghubung antara program pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas.

Berdasarkan Wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa penyuluhan KB di Parenting District, Kabupaten Balangan menjalankan Program KB secara efektif, dengan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh kolaborasi yang kuat di antara banyak pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif keluarga berencana. Selain itu, Program KB di wilayah tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi, program KB diharapkan dapat mencapai tujuannya secara optimal. terlaksananya tugas penyuluh KB melibatkan kader KB dan tokoh masyarakat dalam menjalankan tugas mereka. Kerja sama ini membantu penyuluh menjangkau masyarakat dengan lebih efektif. Namun, di beberapa wilayah, kurangnya kader yang aktif menjadi hambatan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan tugas di masyarakat.

b. Tepat Waktu

Tepat waktu penyuluh keluarga berencana (KB) Merujuk pada kemampuan

penyuluh KB untuk melaksanakan tugas dan aktivitas penyuluhan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketepatan waktu ini sangat penting karena berdampak pada efektivitas program penyuluhan, penerimaan masyarakat, dan pencapaian tujuan program KB secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di simpulkan mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terkait tepat waktu sudah cukup baik, bahkan ketepatan waktu penyuluh KB di Kecamatan Paringin masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini penting agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang optimal dan merasa lebih dihargai. Penyuluh KB perlu lebih disiplin dalam menjaga waktu agar kepercayaan masyarakat terhadap program KB dapat meningkat.

4. Tanggung Jawab

Penyuluh Keluarga Berencana (KB) adalah tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan layanan terkait program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Tugas mereka mencakup berbagai aspek, baik dalam perencanaan keluarga maupun pembangunan kesejahteraan masyarakat.

a. Kesadaran

Kesadaran tanggung jawab Merujuk pada pemahaman mendalam penyuluh KB tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung program KB dan kesejahteraan keluarga. Penyuluh KB memahami bahwa program KB berperan penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong kualitas hidup keluarga.

Berdasarkan Wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kinerja penyuluh KB di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan menunjukkan kesadaran yang memadai, menyoroti adanya kesenjangan antara persepsi perluasan KB dengan kebutuhan masyarakat. Penyuluh keluarga berencana yakin bahwa mereka telah menyebarkan pengetahuan yang cukup. Namun, masyarakat tetap tidak senang dan membutuhkan rincian yang lebih komprehensif, terutama tentang dampak buruk jangka panjang dan strategi untuk mengatasi masalah. Kesadaran tanggung jawab penyuluh KB terhadap tugasnya sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi agar program keluarga berencana dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyuluh memahami pentingnya program KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga yang sehat.

b. Kewajiban

Kewajiban Merujuk pada tugas-tugas formal dan profesional yang harus dilakukan penyuluh KB sesuai dengan mandat dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Menyampaikan manfaat KB, metode kontrasepsi, dan informasi terkait kesehatan reproduksi kepada masyarakat yang benar dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di simpulkan mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terkait kewajiban sudah cukup baik, penyuluh KB memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana. Meskipun sebagian besar masyarakat sudah memahami pentingnya KB, namun masih ada beberapa masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan membutuhkan informasi yang lebih detail dan mudah dipahami mengenai berbagai metode kontrasepsi. penyuluh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

terhadap program KB telah dilakukan secara konsisten, dilakukan di desa-desa untuk memberikan informasi tentang metode kontrasepsi, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat metode konservasi jangka panjang.

B. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan :

1. Faktor pendukung

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terkait faktor pendukung Adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program KB, termasuk penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) secara gratis. Penyediaan fasilitas yang cukup lengkap seperti sepeda motor, laptop, printer, dan internet sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kehadiran kerja sama yang efektif dengan instansi terkait, seperti Puskesmas dan KUA, secara signifikan meningkatkan pelaksanaan inisiatif keluarga berencana. Kegembiraan mereka dalam menawarkan informasi dan bantuan untuk inisiatif keluarga berencana terlihat jelas. Dengan adanya fasilitas yang lengkap, petugas KB dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dapat diasumsikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program KB di Kecamatan Paringin cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak.

2. Faktor penghambat

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terhambat oleh jumlah penyuluh KB yang tidak mencukupi secara signifikan untuk mencakup seluruh kabupaten. Oleh karena itu, setiap penyuluh dituntut untuk mengelola wilayah yang luas, sehingga menghambat penyampaian layanan yang optimal kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menghambat keberhasilan program KB di Kecamatan Paringin adalah kurangnya sumber daya manusia, khususnya penyuluh KB, serta rendahnya kesadaran masyarakat, Perlu dilakukan penambahan jumlah penyuluh KB untuk mengurangi beban kerja penyuluh KB.

SIMPULAN

Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat pada : 1). Kualitas kerja, Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan sudah berjalan dengan cukup baik. Penyuluh KB memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan kepada masyarakat terkait program KB, terutama dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan Implan. Mereka memanfaatkan berbagai strategi, termasuk komunikasi langsung, media sosial, dan aplikasi pelaporan siga, untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. 2). Kuantitas kerja, Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin sudah cukup baik dalam hal pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah penyuluh masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Selain itu, meskipun hasil kerja menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat, masih diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan implant, masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan

berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap program KB. 3). Pelaksanaan tugas, Program Keluarga Berencana (KB) di wilayah tersebut sudah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan hasil yang positif. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya kader aktif dan keterbatasan tenaga penyuluh yang membuat pelayanan belum maksimal di beberapa wilayah. Untuk meningkatkan hasil, diperlukan lebih banyak tenaga penyuluh dan dukungan dari masyarakat. dibandingkan metode jangka panjang (IUD atau implant). Perlu adanya inovasi, perbaikan, dan peningkatan kerja sama dengan tokoh masyarakat agar tujuan program KB dapat tercapai secara optimal. 4). Tanggung jawab, Sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) sudah cukup baik dalam menjalankan tanggung jawabnya terlihat adanya kesenjangan antara persepsi penyulu h KB dan kebutuhan masyarakat. Mereka sadar akan peran pentingnya dalam mendukung program KB dan berupaya menjalankan kewajibannya, seperti memberikan informasi, mendampingi peserta KB, serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan kader KB. Namun, masih ada tantangan seperti masyarakat yang kurangnya informasi mendalam tentang efek samping kontrasepsi dan keterbatasan akses ke penyuluh KB di beberapa wilayah. Untuk meningkatkan efektivitas program, penyuluh KB perlu lebih aktif di lapangan dan memberikan edukasi yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan terdiri dari :

a. Faktor pendukung

   Penyuluh KB di Kecamatan Parenting berdedikasi untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, termasuk penyediaan layanan komunikasi, informasi, dan pendidikan (KIE) kepada masyarakat. Mereka bekerja sama dengan kader keluarga berencana di tingkat desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif keluarga berencana. Kolaborasi antara Balai Penyuluh KB, kader desa, dan tokoh masyarakat memberikan dorongan untuk memperluas jangkauan sosialisasi program KB. Kegiatan seperti kampanye dan diskusi kelompok telah mendukung pelaksanaan program. Penggunaan media sosial, spanduk, dan media cetak oleh penyuluh KB membantu menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya program KB.

b. Faktor penghambat

   Kurangnya fasilitas pendukung seperti alat peraga edukasi, dan kurangnya penyuluh KB menjadi kendala utama dalam melaksanakan tugas penyuluh KB, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil. Jumlah penyuluh yang sedikit tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi program KB di beberapa wilayah. Hal ini mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Randahnya kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan, masih kurang memahami manfaat program KB, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Persepsi negatif terhadap IUD dan implan menjadi tantangan tambahan bagi penyuluh. Kegagalan sistem seperti jaringan komunikasi yang buruk sering kali menghambat pelaksanaan tugas penyuluh KB.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga, pada pasal 21 ayat 1. Jakarta: Kemenkes; 2009.

Ibrahim, M.A, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mangkunegara. (2021). *Manajamen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Mahsun, M. (2019) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Banten: Penerbit. Universitas Terbuka.

Moeheriono, (2014) Pen*gukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Pasolong, H. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung. Alfabeta,.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantiatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pasolong, H. (2017) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Robbins, S P. (2016). *Perilaku Organisasi.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.